

MANAJEMEN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh :

LYDIA INGE MANOPPO^{1*}

NIM : E1011161020

*Email: lydiainge20@student.untan.ac.id

Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Manajemen Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teori Terry G. R. (2003:2) proses yang terdiri atas Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Keempat indikator manajemen tersebut terdiri dari: 1) Perencanaan, kesimpulannya adalah Dalam proses upaya perencanaan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dilihat dari mitigasi dalam rangka mengurangi terjadinya karthula salah satu caranya dengan inovasi pengelolaan lahan gambut; 2) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Pada tahapan kedua BPBD memberikan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat sesuai tupoksi yang di sahkan pada pergub Kabupaten Mempawah; 3) Pengarahan, kesimpulannya adalah Pada tahapan pengarahannya yang dilakukan oleh pihak BPBD melaksanakan rapat dengan kepala desa, gerakan pemuda, polisi, tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Untuk merencanakan bagaimana mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak merambat ke rumah warga setempat; 4) Pengawasan, kesimpulannya adalah Dalam tahapan monitoring ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala BPBD Kabupaten Mempawah bahwa pengendalian karthula perlu dilaksanakan dengan baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti dalam penelitian ini dari segi perencanaan adalah sarana dan prasarana butuh penambahan 1 unit damkar di kabupaten mempawah, alokasi dana yang fokus pada upaya pencegahan karthula di prioritaskan ke desa-desa yang rawan terjadi kebakaran hutan. Selain itu saran-saran lainnya pihak BPBD kabupaten mempawah melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus dilanjutkan agar permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.

Kata Kunci : Manajemen Bencana, Kebakaran Hutan dan Lahan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Perlindungan atas hak-hak dasar ini menjadikan suatu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana (*disaster management*) yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada saat ini dapat dipandang sebagai peristiwa bencana regional dan global. Hal ini disebabkan karena dampak dari kebakaran hutan sudah menjalar ke negara-negara tetangga.

Terjadi protes dan tuntutan dari negara tetangga yang merasa dirugikan karena terkena asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain dampak dibidang internasional tersebut, bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak negatif lainnya seperti, dibidang kesehatan, berupa gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dibidang transportasi, terjadi penundaan dan penutupan bandara akibat terganggunya jarak pandang. Dibidang pendidikan, banyak sekolah yang diliburkan atau dikurangi jam belajarnya. Dibidang sosial-ekonomi, aktifitas di luar rumah berkurang dan menurunnya kegiatan pariwisata. Dibidang lingkungan, kebakaran telah menyebabkan kerusakan flora dan fauna dan dapat merusak ekosistem.

Selama ini penanganan yang dilakukan adalah memperkuat masa penindakan atau saat kebakaran terjadi. Penanganan karhutla yang fokus pada penindakan, mengabaikan esensi manajemen bencana bahwa aspek pencegahan atau pra bencana harus jadi prioritas. Pencegahan atau mitigasi bencana merupakan tahapan pengelolaan bencana yang perlu dilakukan setiap waktu untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi. Kegiatan mitigasi lebih dititik beratkan pada upaya penyusunan

berbagai kebijakan dan strategi yang bertujuan mengurangi resiko bencana. Mengelola bencana tidak bisa dilakukan dengan cara mendadak, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik sebelum bencana terjadi.

Perencanaan (*Planing*) merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan organisasi dan bahkan bisa berpengaruh total bagi organisasi dimasa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Secara khusus penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hal ini dikarenakan BPBD merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan sebagai unsur pelaksanaan penyelenggara penanggulangan bencana yang ada di daerah. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga BPBD diatur dalam peraturan daerah masing-

masing. Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di Kalimantan Barat. Kejadian saat musim kemarau 2019 tersebut kembali memicu bencana asap di banyak daerah. Laporan bencana asap pun bermunculan dari beberapa desa di kabupaten mempawah. Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2019, titik panas ditemukan di desa galang 150 Ha, titik koordinat 0.305460065603, 109.119.949.341. Sementara luas karhutla di Kabupaten Mempawah selama tahun 2019, sesuai data HS tingkat kepercayaan 0-100% pada Tahun 2019 sudah mencapai 636 hektare. Dari data itu, kebakaran di Kabupaten Mempawah tercatat seluas 1523 hektare. Data yang sama menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Mempawah (Kalbar) masuk dalam kategori Tidak Sehat, dengan angka ISPU 160. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. Angka ISPU itu berdasar parameter konsentrasi partikulat PM 10 atau partikel di udara berukuran lebih kecil dari 10 mikron. PM10 adalah partikel debu dan salah satu polutan yang membahayakan sistem pernapasan jika terhisap langsung ke paru-paru serta mengendap di alveoli. Data BMKG yang dilansir harian berdasar parameter konsentrasi PM10, juga menunjukkan

kualitas udara di Kabupaten Mempawah pada konsentrasi PM10 sempat menyentuh level Berbahaya yakni 383,81 $\mu\text{gram}/\text{m}^3$. Angka itu menurun ke level Sangat Tidak Sehat atau 293,73 $\mu\text{gram}/\text{m}^3$. Kemudian penempatan pegawai atau Sumber Daya Manusia pada badan tersebut. Penelitian ini melihat bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dan apakah kapasitas SDM tersebut telah memadai/memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan PB (penanggulangan Bencana). Kondisi SDM di sini, dilihat dari kualitas maupun kuantitas SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Mempawah. Kualitas dan kuantitas SDM mempengaruhi kemampuan BPBD untuk menghadapi kemungkinan bencana dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kemampuan dan kapasitas SDM BPBD yang baik, dapat menekan dampak yang mungkin akan timbul akibat bencana. Dari hasil penelitian kondisi SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilihat dari kualitas, dapat diuraikan dengan singkat bahwa tingkat pendidikan pegawai BPBD Kabupaten Mempawah, sebagian besar (45%) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terdapat beberapa pegawai yang tidak memiliki

latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan, dengan pengetahuan yang minim, khususnya mengenai BPBD dan penanggulangan bencana, penguasaan teknologi yang belum memadai dan motivasi yang relatif rendah. Sementara dilihat dari segi kuantitas, seluruh pegawai BPBD Kabupaten Mempawah berjumlah 22 orang, dengan rincian 11 orang PNS, 10 orang TKS dan 1 tenaga kontrak. Jika dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Mempawah yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lain-lain, serta dari beberapa kali kejadian bencana yang terjadi setelah berdirinya BPBD Kabupaten Mempawah, dapat dikatakan bahwa kondisi SDM BPBD, baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih belum memadai, sehingga BPBD belum dapat memenuhi kapasitasnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Mempawah.

Peneliti mengambil permasalahan ini sebagai bahan penelitian karena manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi hal penting untuk diperhatikan terutama pada perencanaan mitigasi bencana. Mitigasi bertujuan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan disuatu tempat, dan membantu

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan lebih murah dari upaya penanggulangan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam kesiapan masyarakat pada kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Rendahnya tenaga kerja pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Pelaksanaan sebelum kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Pengawasan setiap ada laporan pada bencana kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka peneliti fokuskan pada manajemen mitigasi kebakaran hutan dan

lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah di Desa Galang.

4. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang penelitian dan identifikasi permasalahan, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana manajemen mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Mempawah?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk memperoleh jawaban dari perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan manajemen mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang proses manajemen publik yaitu perencanaan manajemen mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat menambah wawasan dan memberikan informasi pada pembaca untuk menjadi dasar pemikiran dalam memahami teori manajemen publik.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Mempawah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut serta membantu pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, sebagai bentuk informasi bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan manajemen mitigasi bencana.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Terry (2012, 1) Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” - Pengelolaan-, sedang pelaksanaannya

disebut manager atau pengelola. Selanjutnya Terry (2012, 2) mendefisikan manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen, suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada kebenaran-kebenaran umum.

Menurut Hasibuan (dalam Torang, 2016, 165) “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Sarwoto (dalam Torang, 2016:166) berpendapat bahwa manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Deskripsi tersebut mengidentifikasi bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi. ndapat bahwa manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Deskripsi tersebut mengidentifikasi bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi.

2. Manajemen Bencana

Manajemen Bencana menurut Nurjanah dkk (2013, 42) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen Bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

W. Nick Carter (2008) dalam *Disaster Management Handbook* menyebutkan bahwa : “*disaster management is essentially a dynamic process. It encompasses the classical management functions of planning, organizing, staffing, leading, and controlling. It also involves many organizations which must work together to prevent, mitigate, prepare for, respond to, and recover from the effects of disaster. Disaster management is defined as: An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery*”.

Dengan demikian dapat didefinisikan manajemen bencana yaitu adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal ini juga melibatkan banyak organisasi yang harus bekerja sama untuk mencegah, mungurangi, mempersiapkan, menanggapi,

dan memulihkan dari dampak bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai: Ilmu terapan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan langkah-langkah yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

3. Mitigasi Bencana

Tahap awal dalam siklus manajemen bencana adalah mitigasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi ialah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberi kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No.33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya di dalam suatu negara atau masyarakat.

Menurut Coppola (dalam Adiyoso 2018, 166) mitigasi merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko bahaya melalui pengurangan kemungkinan dan/ atau

komponen konsekuensi dari risiko bencana.

Dari beberapa definisi mitigasi di atas dapat disimpulkan mitigasi dilaksanakan untuk menghadapi berbagai jenis bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana akibat ulah manusia dengan meminimalisir risiko dan dampak bencana.

Kerangka Pikir

Judul
Manajemen Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah



Masalah:

1. Perencanaan dalam kesiapan masyarakat pada kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Rendahnya tenaga kerja pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Pelaksanaan sebelum kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Pengawasan setiap ada laporan pada bencana kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.



Teori:
G. R. Terry (2003:2) Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan

4. Pengawasan
Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Mengoptimalkan penanggulangan bencana dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah

C. METODE PENELITIAN

Jenis yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2010, 33) penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis.

Menurut Sukmadinata (2006, 45) penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat atau efek yang terjadi tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. Selanjutnya menurut Mayer dan Greenwood (dalam Ulber Silalahi 2012, 27) Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik

sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya, dekritif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan agar bisa mendeskripsikan keadaan, gejala, dan masalah yang terjadi pada Manajemen Bencana kebaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara objektif dan kompleks sesuai dengan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.

Langkah-Langkah Penelitian Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, tahapan yang dilalui oleh seseorang peneliti kualitatif tersebut adalah:

1. Melakukan survei atau pendahuluan penelitian.
2. Pengambilan data primer dan data sekunder terkait masalah yang akan diteliti.
3. Studi kepustakaan untuk menemukan teori-teori, dokumen dan sebagainya.
4. Membuat pedoman wawancara, pedoman observasi.
5. Melakukan wawancara, observasi atau dokumentasi.
6. Melakukan analisis data, menjelaskan teknik analisis yang digunakan.
7. Menceritakan tahapan analisis data.
8. Menyajikan data sampai pada pengambilan kesimpulan.
9. Penyusunan laporan.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kecamatan Sungai Pinyuh, Desa Galang dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan manajemen bencana kebakaran hutan dan lahan.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sebagai organisasi yang dapat mengkoordinir dengan instansi lain dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Kecamatan Sungai Pinyuh, Desa Galang sebagai kecamatan terdapat lahan perkebunan dan memiliki tanah gambut.

Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Teknik Wawancara Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan subjek penelitian mengenai mitigasi dalam manajemen bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memperoleh gambaran mengenai manajemen mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Mempawah.
2. Teknik Observasi Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana mitigasi dalam Manajemen Bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Mempawah.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memilih data-data, dokumen-dokumen dalam rangka pengumpulan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dan Kecamatan Sungai Pinyuh. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan

dan memfotocopy data-data yang berkaitan dengan masalah mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya "*managing*" -Pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dalam visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (G.R.Terry, 2012). Perencanaan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Rencana Manajemen Mitigasi Pasca Bencana, pada tahap ini proses yang dilakukan oleh BPBD yakni terdiri dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini dimana menghasilkan program seperti pembentukan KSB, pembuatan peta risiko/rawan bencana, dan juga rencana kontijensi.
- b. Perencanaan dalam Sarana dan Prasarana untuk menunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah dilapangan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dimana dengan luasnya wilayah Kabupaten

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah. bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah terutama di Desa Galang. Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dimana tenaga kerja pemadam kebakaran hanya 14 orang dan di bagi regu menjadi 4 orang per satu regu dan mempunyai waktu berganti setiap harinya. Namun dengan tenaga sebanyak 14 orang tenaga kerja masih kurang menangani kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas, dan mobil tangki hanya memiliki 2 apabila terjadi kebakaran hutan secara bersamaan tapi berbeda lokasi itu akan mengakibatkan kesulitan dalam menangani kebakaran hutan di Kabupaten Mempawah.

c. Perencanaan dalam Anggaran Anggaran yang ada dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah tidak dapat dikelompokkan ke dalam sub prioritas bencana tertentu, seperti bencana Kebakaran. anggaran untuk masalah

bencana kebakaran hutan dan lahan masih belum mencukupi bahkan pihak desa galang masih kurang cukup, yang dimana bantuan diberikan ke Desa Galang oleh BPBD malah untuk ke desa lain padahal desa galang memiliki tanah gambut yang sangat luas sehingga membutuhkan bantuan yang lebih untuk tidak terlalu luas ketika bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi. Dan pihak desa galang terkadang meminta tambahan tenaga damkar karena masih kurang cukup dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Relawan maupun masyarakat pun kewalahan dengan api yang terjadi di desa galang karna tanah desa tersebut tanah gambut yang sulit untuk di padamkan.

d. Melakukan Sosialisasi tentang Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Desa Galang mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara terjun langsung ke masyarakat seperti melakukan pelatihan penanggulangan bencana, pembuatan titik-titik penampungan air, menyebarkan brosur, spanduk, dan baleho. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD di

Desa Galang. Sosialisasi yang dilakukan pun mendapat respon yang positif dan antusias dari masyarakat setempat. Dan pentingnya sosialisasi ke masyarakat karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahayanya membakar hutan dan lahan. Kurangnya Kesadaran masyarakat seperti membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok bisa mengakibatkan kebakaran. Maka dari itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi hambatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- e. Memonitoring daerah rawan bencana kebakaran hutan dan menentukan pemetaan daerah rawan bencana bahwa BPBD Kabupaten Mempawah telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan melakukan monitoring daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan cara memberikan himbauan kepada warga setempat agar tidak membuka lahan dengan cara bakar. Dengan adanya himbauan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya Karhutla dan terbukti pada setiap tahunnya

kebakaran yang terjadi di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan.

2. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi.

Pengorganisasian juga merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Proses pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokkan, yakni disamping pengelompokkan orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, juga akan diikuti sertakan pula dengan pengelompokkan fasilitas dan bahan yang diperlukan dalam pengelolaan tugas tersebut, dibawah ini dipaparkan empat langkah pokok dalam proses pengorganisasian tersebut seperti dikemukakan para ahli, yakni: 1. Merinci semua aktivitas untuk mencapai tujuan. Semua aktivitas harus dirinci, mendetail. 2. Merinci semua keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan semua tugas dan

kegiatan yang diperlukan. 3. Membagi-bagikan tugas, aktivitas, wewenang dan tanggung jawab kepada seseorang atau kelompok orang secara logis, sehingga membentuk suatu struktur organisasi. 4. Menentukan aturan main atau mekanisme pengelolaan aktivitas tersebut. Mekanisme ini dapat berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam kesatuan yang harmonis.

Saat darurat bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan tanggap darurat bencana, dan juga pemberian logistik kepada korban Pasca bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan kegiatan yakni rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sudah dibagi masing-masing wewenangnya.

3. PENGARAHAN

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur

organisasi yang efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pengarahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan saran dan pembinaan sering dilakukan setiap minggunya walaupun terkadang terjadi miss komunikasi antara pekerja lapangan tetapi dalam perintahnya atau instruksi telah dilakukan sesuai dengan proses dan prosedurnya.

4. PENGAWASAN

Secara umum pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan, pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjektif apapun terdiri dari fase sebagai berikut: a. Menetapkan alat pengukur (standar) b. Mengadakan penilaian c. Mengadakan tindakan perbaikan . Dari seluruh wawancara diatas , diketahui bahwa di dinas tersebut tidak adanya terjadi penyimpangan di lapangan dengan ini dapat dikatakan bahwa petugas telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga saat mereka bertugas tidak adanya penyimpangan. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah di Desa Galang terjun langsung ke lapangan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaannya, dan hasil nantinya. Apabila terjadi kendala terjadi di lapangan maka dilakukan dicari solusi, tindakan serta penyelesaiannya.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari manajemen bencana oleh BPBD dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Galang Kabupaten

Mempawah adalah dengan melaksanakan tahapan- tahapan manajemen bencana, yaitu:

1. Perencanaan

Dalam proses upaya perencanaan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dilihat dari mitigasi dalam rangka mengurangi terjadinya karthula salah satu caranya dengan inovasi pengelolaan lahan gambut. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki kantor BPBD mobil pemadam kebakaran 2 unit Kabupaten Mempawah beserta peralatannya dengan 4.000 liter/unit. Dan pihak BPBD Kabupaten Mempawah dalam mengalokasikan dana melihat situasi kebakaran di setiap desa-desa yang rawan bencana kebakaran dan mengikuti perbup yang telah disahkan. BPBD juga melakukan kegiatan sosialisasi 2 kali dalam setahun guna memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

2. Pengorganisasian

Pada tahapan kedua BPBD memberikan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat sesuai tupoksi yang di sahkan pada pergub Kabupaten Mempawah.

3. Pelaksanaan

Pada tahapan pengarahan yang dilakukan oleh pihak BPBD melaksanakan rapat dengan kepala desa, gerakan pemuda, polisi, tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Untuk merencanakan bagaimana mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak merambat ke rumah warga setempat.

4. Pengawasan

Dalam tahapan monitoring ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala BPBD Kabupaten Mempawah bahwa pengendalian karthula perlu dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli rutin agar mengantisipasi terjadinya kebakaran.

2. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dilapangan yaitu:

1. Perencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan keikutsertaan masyarakat, selalu memberikan sosialisasi edukasi tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara rutin sehingga membuat masyarakat sadar akan pentingnya hutan bagi kelestarian makhluk hidup. Kemudian sarana dan prasarana butuh penambahan 1 unit WWK damkar di kabupaten mempawah, alokasi dana yang

fokus pada upaya pencegahan karthula di prioritaskan ke desa-desa yang rawan terjadi kebakaran hutan.

2. Pengorganisasian

BPBD harus manajemen lapangan terkonsolidasi dan terorganisasi dimana kalau ada api kecil itu sudah harus diberitahukan agar segera bisa tertangani didepan. Kemudian harus bergerak untuk melakukan pemantaun di area-area yang rawan titik panas. Karena jika sudah terlambat upaya dalam penanganan lebih sulit dilakukan.

3. Pelaksanaan

Infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus tingkat bawah agar unsur pemerintah serta TNI dan Polri di bawah yaitu Kepala desa turut dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan ini. Serta pihak BPBD kabupaten mempawah melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus dilanjutkan agar permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.

F. REFRENSI

Buku :

- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana Pengantar & Isu-isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Carter, Nick W. 2008. *Disaster's Management, A Disaster's Manager Handbook*. Philipines: Asian Development Bank

- Fadhli, Aulia. 2019. *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harlinda, Della. 2016. "Manajemen Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Pencegahan Kebakaran Pemukiman Penduduk di Kota Pontianak." Skripsi. Universitas Tanjungpura.
- Kriswanto. 2015. "Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang." Skripsi., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Ekploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, Goerge R. 2003. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, Goerge R dan Leslie W.Rue. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Internet (karya individual):**
- Arifin, A. 2020. "Efektifitas Implementasi Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak." JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development 1, N0.2 (2020): 197-198. doi : <http://dx.doi.org/10.26488/jpasdev.vil2.43654> hal. 153-165.
- Internet :**
- Satu Data Kalbar. 2020. "Hostspot 2015." Diakses 8 Juli. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/otspot-2015>
- Satu Data Kalbar. 2020. "Hostspot 2016." Diakses 8 Juli. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/otspot-2016>
- Satu Data Kalbar. 2020. "Hostspot 2017." Diakses 8 Juli. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/otspot-2017>
- Satu Data Kalbar. 2020. "Hostspot 2018." Diakses 8 Juli. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/otspot-2018>
- Satu Data Kalbar. 2020. "Hostspot 2019." Diakses 8 Juli. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/otspot-2019>
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2017
- Dokumen Resmi:**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.